



-O %ULJMHQG 6XGLDUWR .0  
7HOS

.RPSOHNV 7I  
)D[

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 wajib dilaksanakan sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999. LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategik Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat selalu dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 20 Januari 2020

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Semarang**



**Ir. A. Rudianto, M.T**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	ii
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM.....	2
C. PERMASALAHAN UTAMA.....	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN LKJIP .....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	8
A. RENCANA STRATEGIS.....	8
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	16
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	22
BAB IV PENUTUP .....	25
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang ada beberapa aspek pendukung lainnya yang meliputi (a) Aspek keuangan ; (b) Aspek SDM; (c) Aspek sarana dan prasarana, dan (d) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Tap MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 , yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. Disamping itu penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi,misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang pada akhir tahun anggaran atau pada saat penyusunan laporan.

## **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kota Semarang, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat bencana termasuk pula pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan teknik dan operasional terhadap unit - unit Penanggulangan bencana, instansi pemerintah swasta dan masyarakat di bidang usaha pencegahan penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan peningkatan keterampilan tenaga sukarelawan dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait didalam penanggulangan bencana;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

### **2) Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari:

a. Ketua yang dijabat oleh kepala badan, dan

b. Anggota yang berasal dari:

a) lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.

b) masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

1) Kepala Pelaksana

2) Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan umum dan kepegawaian.

b) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan keuangan.

c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan perencanaan dan evaluasi.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu:

a) Seksi Pencegahan Bencana

Seksi Pencegahan Bencana menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

b) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 seksi yaitu:

a) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

b) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 seksi yaitu:

a) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

b) Seksi Rekonstruksi

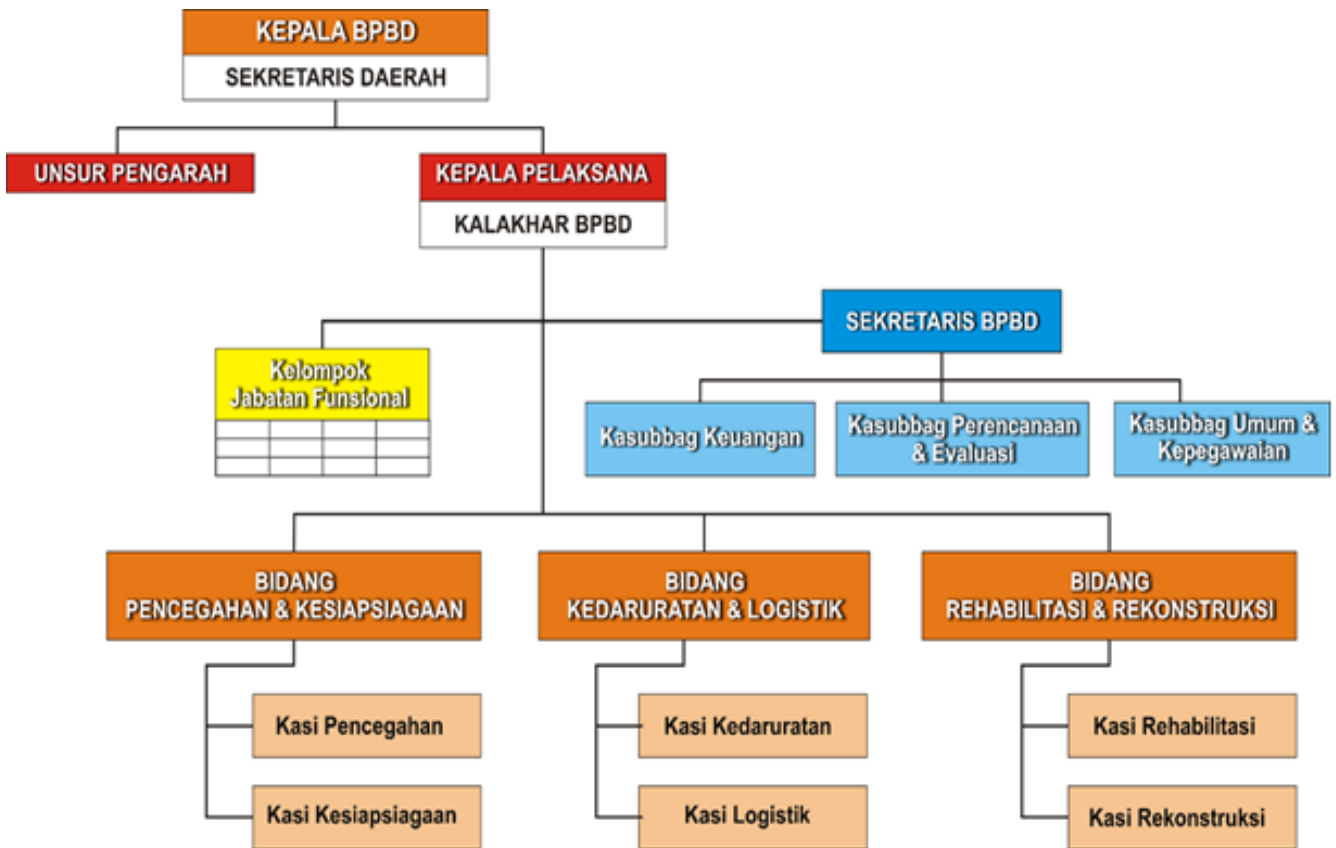
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi

### **3) Sumber Daya Manusia**

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah personil BPBD Kota Semarang sejumlah 44 ASN yang terdiri dari :

1. Jabatan struktural eselon II sebanyak : 1 orang
2. Jabatan struktural eselon III sebanyak : 4 orang
3. Jabatan struktural eselon IV sebanyak : 8 orang
4. Staf sebanyak 31 orang

## BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG



#### 4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang dan operasional yang dimiliki BPBD

Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 1. 1 Data Alokasi Kendaraan :*

No	Alokasi Kendaraan	Jumlah dan Kondisi Roda 2	Jumlah dan Kondisi Roda 4
1	Sekretariat	10	2
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	1
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	2	1
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	1
5	Kebencanaan	5	8



Tabel 1.2 Data Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja	61
2	Kursi	79
3	Komputer	25
4	Laptop	22
5	Cabinet	13
6	Air Conditioner (AC)	29
7	Printer	18
8	Camera	23
9	TV	22
10	LCD	2

### C. PERMASALAH UTAMA

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan isu yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit Pusdalops. Salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan misi. Sebagai masukan dalam menentukan visi adalah adanya kenyataan bahwa Pusdalops mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan/ penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah *emergency* dan *rescue* serta rehabilitasi.

Realisasi lainnya adalah peningkatan peran Pusdalops dan peningkatan institusinya sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat Kota Semarang yang tangguh bencana mungkin diwujudkan melalui Kelurahan Siaga Bencana (KSB) serta membentuk Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) dimana seluruh elemen masyarakat, badan usaha serta instansi pemerintahan yang terkait dengan kebencanaan dapat saling sinergi dalam mewujudkan Kota Semarang yang tangguh akan bencana

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP**

Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BPBD Semarang tahun 2017 – 2021 disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Berisi tentang penyajian singkat mengenai : Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, serta Prestasi yang diraih BPBD Kota Semarang.

##### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja OPD serta langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1) Tujuan dan Sasaran**

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasarannya adalah menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan/ aset Pemerintah Kota Semarang baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang bias dan tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana.

##### **2) Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan**

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan - kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan bencana, sehingga aset / angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	20
2	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	100%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	20
2	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.573.125.000	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 484.859.000	-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 177.475.000	-
4.	Program Penanganan Bencana	Rp. 4.787.896.000	-
5.	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 714.295.000	-
6.	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana	Rp. 395.066.000	-
	JUMLAH	Rp. 9.132.716.000	-

**LEMBAR PENGUKURAN KINERJA  
BPBD KOTA SEMARANG**

OPD : BPBD KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Cakupan Mitigasi Penanggulangan Bencana	20	20	20	100	100
2	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Tingkat kapasitas adaptasi bencana	100%	100%	100%	100	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA BPBD KOTA SEMARANG

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra BPBD Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

Adapun capaian kinerja Bappeda Kota Semarang pada Tahun 2019 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2019. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukanevaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kota Semarang pada tahun 2020 Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Presentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### Indikator Kinerja Utama Dan Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator  
Dan Target Kinerja BPBD Kota Semarang Tahun 2016-2021**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI	TARGET					TERGET AKHIR
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan	INDIKATOR TUJUAN : Indeks Resiko Bencana	%	-	172.96	161.92	150.88	139.84	128.80	128.80
SASARAN 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Cakupan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Kelurahan	-	5	10	15	20	25	50
SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Tingkat kapasitas adaptasi bencana	persen	-	100	100	100	100	100	100

**Matriks Program dan Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja  
pada Perubahan Perjanjian Kinerja BPBD Kota Semarang Tahun 2020  
(Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV)**

PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat OPD	100 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbayarnya listrik, air dan internet	100 %
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	100 %
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	100 %
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pengadaan barang cetakan	100 %
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	100 %
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan bakar minyak	100 %
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan minum rapat	100 %
9	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi keluar daerah, Persiapan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Skala Nasional,	100 %
10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %
11	Penyediaan Jasa Pengamanan	Jasa Keamanan Kantor 6 Orang	100 %
12	Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi,	Publikasi melalui media massa	100 %
13	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Kontrak dan faktor pendukung kinerja OPD	100 %
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>



1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi	100 %
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	100 %
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	100 %
4	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Service dan penggantian sparepart	100 %
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100 %
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi	100 %
7	Pengelolaan Web Site	Update Sistem Informasi OPD	100 %
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>
1	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Honorarium PA, KKPA, PPK, bendahara dan pembantu,	100 %
2	Penyusunan Lkpd Skpd	Pembuatan dokumen LKPD	100 %
3	Penyusunan Lakip	Pembuatan dokumen LAKIP	100 %
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	100 %
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaporan akhir tahun,	100 %
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen semesteran	100 %
7	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis	100 %
8	Penyusunan Renja Skpd	Dokumen Renja SKPD	100 %
9	Penyusunan Rka Dan Dpa Murni	Dokumen rka dan dpa murni,	100 %
10	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Dokumen rka dan dpa perubahan,	100 %
<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>Persentase pemenuhan bagi korban bencana</b>	<b>100 %</b>
1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana	Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	100%

2	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan	Pemeliharaan Sarpras kebencanaan	100%
3	Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana	Tersedia bahan pangan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana	100%
4	Peningkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap Darurat	Pelatihan skill atau kemampuan dalam penanganan darurat bencana	100%
5	Pusat Pengendalian Operasi	Pusat Pengendali Operasi seluruh Kegiatan Kebencanaan yang tersedia	100%
<b>Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana</b>		<b>1. Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan</b>	<b>81,06 %</b>
		<b>2. Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS</b>	<b>80%</b>
		<b>3. Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana</b>	<b>92.70%</b>
1	Pemetaan Rawan Bencana	Perhitungan IRBI	100%
		Pembuatan Peta Resiko Bencana Sosial Daerah Rawan Bencana serta Upgrade Peta	100%
2	Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk)	Workshop stekholder kebencanaan berbasis komunitas dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana	10
3	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana	100%
4	Kelurahan Siaga Bencana	Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang	10
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia KSB	Pelatihan Kesigapan Bencana di kelurahan siaga bencana yang telah terbentuk,	10
6	Peringatan Dini Bencana / Ews	Penyediaan Early warning system dan pemeliharaan	3
7	Sinergitas Pembangunan Kelembagaan Bencana	Sinergitas antara stakeholder terkait kebencanaan	100%
<b>Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana</b>		<b>Persentase cakupan pemulihan pasca bencana</b>	<b>100%</b>
1	Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana	Terfasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	100%
2	Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana	100%

3	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana	Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana	100%
4	Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana	Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh	100%
5	Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Terselenggaranya sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pasca bencana	100%
6	Pengelolaan Bantuan Korban Bencana	Bantuan Air Bersih dan pendampingan bantuan sosial	100%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, oleh karenanya termasuk hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja ini paling tidak mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antar perencanaan strategis dengan kinerjanya (vertikal), maupun manfaat dari kebijakan, program, maupun kinerja bagi pihak-pihak yang menerima manfaat, dari jasa yang diterimanya (horisontal).

Dalam tataran operasional maka akuntabilitas kinerja berkaitan dengan implementasi strategi dan pengawasannya. Evaluasi tataran operasional ini secara mendetail dilakukan pada evaluasi kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan analisis secara komprehensif dalam tataran operasional ini paling tidak akan mampu melihat keterkaitan antara kinerja dengan perencanaan strategisnya.

Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci.

Disamping itu, perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis masukan keluaran (*input-output*), analisis realisasi hasil (*outcomes*) dan manfaat (*benefits*), analisis dampak (*impacts*) baik positif maupun negatif, analisis keuangan dan analisis kebijakan.

Adapun hasil kinerja lainnya dari pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Semarang pada tahun 2020 adalah tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pencapaian hasil-hasil kinerja tersebut di atas diperoleh melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut :

## 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2020			REALISASI TAHUN 2019
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	96.72%	96.72%	100%

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” sebesar 96.72% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target ini karena rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah, serta belanja jasa penunjang administrasi perkantoran.

## 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2020			REALISASI TAHUN 2019
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	98.81%	98.81%	100%

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur” sebesar 98.81% dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %. Tidak tercapainya target ini karena rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dan mebeluer dan Pengelolaan web site.

**3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2020			REALISASI TAHUN 2019
	TARGET	REALISASI	%	
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan” sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu.

#### 4) Program Penanganan Bencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2020			REALISASI TAHUN 2019
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase pemenuhan bagi korban bencana	97.35%	94.01%	96.56%	95,14%

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Persentase Pemenuhan Bagi Korban Bencana” sebesar 97.35% dari yang ditargetkan sebesar 94.01%. Tidak tercapainya target ini karena rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

#### KEGIATAN YANG BERHASIL

- Pusat pengendalian operasi

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan, Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana, Peningkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi

#### 5) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2020			REALISASI TAHUN 2019
	TARGET	REALISASI	%	
1 Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	81,06 %	90.31%	111,41 %	65.92%
2 Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	80%	80%	100 %	40,00%
3 Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	92.70%	95.00%	102.48 %	85.36 %

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah :

- 1) Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan sebesar 90.31% dari yang ditargetkan sebesar 81,06 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 64,73 %.
- 2) Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS sebesar 80% dari yang ditargetkan sebesar 80%, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 40,00 %.
- 3) Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana sebesar 95.00% dari yang ditargetkan sebesar 92.70%, Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 85,36%.

### **KEGIATAN YANG BERHASIL**

- a) Pemetaan rawan bencana
- b) Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (prb bk)
- c) Kelurahan Siaga Bencana
- d) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
- e) Peringatan Dini/ EWS
- f) Sinergitas pembangunan kelembagaan bencana

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk), Forum Prb, Kelurahan Siaga Bencana, Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, Peningkatan Sumberdaya Manusia Ksb, Peringatan Dini Bencana/ Ews, Pelatihan Sdm Rescue dan Sinergitas Pembangunan Kelembagaan Bencana.

### **6) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Tahun 2020			REALISASI TAHUN 2019
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	100%	88.33%	88.33%	99.17 %

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Persentase cakupan pemulihan pasca bencana” sebesar 88.33% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target ini karena rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.



## **KEGIATAN YANG BERHASIL**

- a) Fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak bencana
- b) Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana,
- c) Pemberdayaan masyarakat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana, Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana, Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana, Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi dan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana.

PROGRAM/ KEGIATAN YANG GAGAL..... *(tidak ada)*

## **KENDALA/ HAMBATAN**

Target sasaran telah dapat terealisasi sesuai tingkat capaian yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan hambatan atau kendala dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,

- a. Terbatasnya kualitas aparatur BPBD;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
- c. Masih rendahnya pengetahuan teknis personil terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana;
- d. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. Upaya penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara terpadu.

## **TINDAK LANJUT**

Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah (tindak lanjut) dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana/pasca bencana.
- d. Metode sosialisasi yang dijalankan mesti berubah sehingga dapat dipahami dan di terapkan;
- e. Pelatihan tanggap bencana yang melibatkan masyarakat daerah rawan bencana.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Target dan Realisasi Pendapatan

Bpbd Kota Semarang bukan merupakan perangkat daerah penghasil, sehingga tidak memiliki target dan realisasi pendapatan.

### 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2020, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional BPBD Kota Semarang adalah sebesar Rp. 16.364.278.938,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.403.712.638,- (88.02%). Anggaran tersebut terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.084.537.938 dengan realisasi sebesar Rp. 6.235.199.581,- (88.01%)
- 2) Belanja Langsung sebesar Rp. 9.279.741.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.168.513.057,- (88.03%)

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

NO. REK	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSEN TASE (%)
<b>1.1.05.1.1.05.04.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.513.775.000</b>	<b>1.988.525.683</b>	<b>79,11</b>
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.250.000	190.839.183	82,17
008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	215.620.000	197.437.900	91,57
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.430.000	51.470.000	94,56
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.250.000	27.787.000	95,00
014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.000.000	56.828.000	84,82
016	Penyediaan bahan logistik kantor	340.000.000	209.268.180	61,55
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	283.670.000	184.412.500	65,01
028	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	316.323.000	311.178.701	98,37
019	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	471.250.000	302.950.000	64,29

032	Penyediaan jasa pengamanan	200.620.000	181.724.719	90,58
145	Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi	30.000.000	23.300.000	77,67
154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	270.362.000	248.329.500	91,85
<b>1.1.05.1.1.05.04.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>525.028.000</b>	<b>475.794.220</b>	<b>90,62</b>
007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	62.750.000	60.236.760	95,99
009	Pengadaan peralatan gedung kantor	81.569.000	68.240.000	83,66
022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.850.000	60.350.000	99,18
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	180.000.000	172.918.500	96,07
026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31.850.000	14.374.960	45,13
028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	86.300.000	79.041.000	91,59
139	Pengelolaan Website	21.709.000	20.633.000	95,04
<b>1.1.05.1.1.05.04.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>177.475.000</b>	<b>160.225.000</b>	<b>90,28</b>
005	Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu	177.475.000	160.225.000	90,28
<b>1.1.05.1.1.05.04.27</b>	<b>Program Penangan Bencana</b>	<b>4.988.252.000</b>	<b>4.615.949.554</b>	<b>92,54</b>
002	Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana	75.760.000	70.951.000	93,65
003	Pemeliharaan sarana dan prasarana bidang kebencanaan	288.356.000	67.495.454	23,41
004	Penyediaan logistik, obat-obatan dan bantuan korban bencana	3.627.074.000	3.585.620.100	98,86
005	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Tanggap Darurat	12.800.000	10.020.000	78,28
006	Pusat pengendalian operasi	984.262.000	881.863.000	89,60

<b>1.1.05.1.1.05.04.28</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</b>	<b>680.145.000</b>	<b>601.333.600</b>	<b>88,41</b>
003	Pemetaan rawan bencana	145.530.000	144.526.000	99,31
004	Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (prb bk)	75.230.000	59.470.000	79,05
006	Kelurahan Siaga Bencana	124.285.000	117.575.000	94,60
007	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	41.280.000	20.612.600	49,93
008	Peningkatan Sumberdaya Manusia KSB	36.490.000	3.820.000	10,47
009	Peringatan Dini/ EWS	245.520.000	245.010.000	99,79
011	Sinergitas pembangunan kelembagaan bencana	11.810.000	10.320.000	87,38
<b>1.1.05.1.1.05.04.29</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana</b>	<b>395.066.000</b>	<b>326.685.000</b>	<b>82,69</b>
003	Fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak bencana	86.708.000	81.680.000	94,20
004	Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana	10.210.000	9.960.000	97,55
005	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bencana	18.620.000	9.460.000	50,81
007	Pemulihan kembali prasarana dan sarana infrastruktur akibat bencana	199.410.000	196.040.000	98,31
009	Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi	12.111.000	11.860.000	97,93
010	Pengelolaan Bantuan Korban Bencana	68.007.000	17.685.000	26,00
<b>JUMLAH</b>		<b>9.279.741.000</b>	<b>8.168.513.057</b>	<b>88,03</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam Tahun anggaran 2020.

Dari Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Kinerja terhadap Kegiatan, Program dan Kebijakan serta pembobotan seperti yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2020 dikategorikan Sangat Baik.

#### **B. TINJAUAN KHUSUS**

Di BPBD Kota Semarang sudah disiapkan personil sejumlah 30 orang PUSDALOPS yang semuanya merupakan tenaga lapangan untuk (SAR) yang sewaktu-waktu dibutuhkan dilapangan apabila terjadi bencana di wilayah kota Semarang selama 24 jam dan 7 orang PUSDATIN untuk update data bencana secara cepat dan tepat.

#### **C. SARAN**

1. Pada tahun berikutnya sangat diperlukan bantuan langsung dari BPBD Kota Semarang berupa paket material dan paket tenaga kerja untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta mengantisipasi dampak kerugian akibat bencana.
2. Pada tahun berikutnya, bantuan masyarakat yang terkena bencana dan atau korban bencana yang bersifat kedaruratan perlu ditingkatkan jumlah dan jenis bantuan sembako.

**Kepala Pelaksana**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Semarang**



**Ir. A. Rudianto, M.T**